



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Kota Samarinda ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut disingkat Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga  
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan  
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;

- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua  
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Daerah;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 10

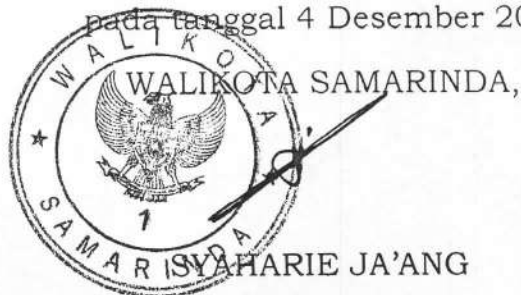
Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2018



Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR....



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Kota Samarinda ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut disingkat Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga  
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan  
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;

- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

## Bagian Kedua Jakstrada

### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas:
- menyusun dan melaksanakan Jakstrada Daerah;
  - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2018


WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

 *[Signature]*  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 35.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
 NOMOR 35 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA  
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
 SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
 KOTA SAMARINDA**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda

| No | Indikator  | Target Pengurangan |            |            |            |            |            |            |            |
|----|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |  | 2018               | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| 1  | Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda (Ton/Tahun) | 219.456,94         | 223.524,20 | 227.705,76 | 232.005,26 | 236.426,44 | 240.973,19 | 245.649,52 | 250.459,59 |
| 2  | Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                          | 18%                | 20%        | 22%        | 24%        | 26%        | 27%        | 28%        | 30%        |
| 3  | Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda           | 39.502,25          | 44.704,84  | 50.095,27  | 55.681,26  | 61.470,87  | 65.062,76  | 68.781,87  | 75.137,88  |

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda

| No | Indikator  | Tahun      |            |            |            |            |            |            |            |  |  |
|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
|    |  | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |  |  |
| 1  | Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun) | 219.456,94 | 223.524,20 | 227.705,76 | 232.005,26 | 236.426,44 | 240.973,19 | 245.649,52 | 250.459,59 |  |  |
| 2  | Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas            | 73%        | 80%        | 75%        | 74%        | 73%        | 72%        | 71%        | 70%        |  |  |
| 3  | Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda              | 160.203,56 | 178.819,36 | 170.779,32 | 171.683,89 | 172.591,30 | 173.500,70 | 174.411,16 | 175.321,71 |  |  |



LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
 NOMOR 35 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA  
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SAMARINDA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

| NO. | KEBIJAKAN  | STRATEGI   | PROGRAM   | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |   |   |
|-----|--|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|--------------|------------------|---|---|
|     |  |  |   |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |              |                  | 2023  | 2024  |
| 1.  | Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practicable technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/<br>tahun |       |      |      |      |      |              |                  | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPPT | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov |
|     |  |  | 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana   |                   |       |      |      |      |      |              |                  |   | Dinas Perindustrian, Dinas  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |  |
|-----|-----------|----------|---|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--------------|------------------|--|
|     |           |          |   |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |              |                  |  |
|     |           |          | pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  | Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov.  |
|     |           |          | a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/<br>tahun | V     | V    |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov. |
|     |           |          | b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga    | Dokumen/<br>tahun | V     | V    |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional   |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG  |
|-----|-----------|----------|---|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--------------|---|
|     |           |          |   |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |              |   |
|     |           |          |   |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              | (BSN),<br>Kementerian<br>PUPR,<br>Kementerian<br>KLHK,<br>Pemprov   |
|     |           |          | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga   | Dokumen/<br>tahun | V     | V    |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov |
|     |           |          | 3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: |                   | V     | V    |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian               |

| NO. | KEBLAKAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDEKUNG   |
|-----|------------|----------|---|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------------------------|--|
|     |            |          |   |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |                        |  |
|     |            |          | a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/<br>tahun | V     | V    |      |      |      |      |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | KLHK, Pemprov/<br>Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov. |
|     |            |          | b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga     | Dokumen/<br>tahun | V     | V    |      |      |      |      |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov.                   |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG       |  |
|-----|-----------|----------|---|-------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------|--|
|     |           |          |   |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |              |                        | 2024   |
|     |           |          | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga   | Dokumen/<br>tahun | V     | V    |      |      |      |      |              | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov. |
|     |           |          | 4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:<br>a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/<br>tahun | V     |      |      |      |      |      |              | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov  |
|     |           |          | b) Pendaauran ulang Sampah Rumah  | Dokumen/<br>tahun | V     |      |      |      |      |      |              | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perindustrian  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN   | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |                        |   |
|-----|-----------|----------|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--------------|------------------|------------------------|---|
|     |           |          |  |  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |              |                  |                        |   |
|     |           |          | Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                    | tahun  |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  | Hidup                  | , Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov                    |
|     |           |          | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga        | Dokumen/<br>tahun  | V     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemprov |
|     |           |          | b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah | 1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: | V     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  |                        |   |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN        | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA   | SEKTOR PENDUKUNG       |  |
|-----|-----------|----------|---|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|------------------------|--|
|     |           |          |   |               | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |                        |  |
|     |           | Daerah   | a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga   | Dokumen/tahun | V     | V    |      |      |      |      |      |      |  |  | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan, Kementerian Agama.                         | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan, Kementerian Agama.                         |
|     |           |          | b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah |               | V     | V    |      |      |      |      |      |      |  |  | DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan, Kementerian | Pemprov dan Pemkot     | DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan, Kementerian |

| NO. | KEBLAKKAWANAN | STRATEGI  | PROGRAM   | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   |  | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|---------------|---|---|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--|--------------|------------------|
|     |               |   |   |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |  |              |                  |
|     |               |   |   | Dokumen/<br>tahun | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas Lingkungan Hidup   | Agama.       |                  |
|     |               | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah |                   | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | DPR, DPRD provinsi, DPRD kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Pemprov.        |              |                  |
|     |               | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, dan kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga          | 1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:<br>a) Pemerintah Pusat                                       | K/L               | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas Lingkungan Hidup Kota  |              |                  |
|     |               |   |   |                   | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan |              |                  |



| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN       | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   |                        | SEKTOR UTAMA  | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|------------------------|---|------------------|
|     |           |          |  |              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |                        |   |                  |
|     |           |          | b) Pemprov dan Pemkot  | Daerah / OPD | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, , pemprov | Trasmigrasi.     |
|     |           |          | c) DPRD Kota   | Daerah       | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, pemprov   |                  |
|     |           |          | 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali |              |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |                        |   |                  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN   | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG   |                        |
|-----|-----------|----------|--|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|--|------------------------|
|     |           |          |  |          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |              |  |                        |
|     |           |          | Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di: |          |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              |  |                        |
|     |           |          | a) Tingkat Nasional  | Kegiatan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, pemprov. | Dinas Lingkungan Hidup |
|     |           |          | b) Tingkat Provinsi  | Kegiatan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, pemprov  | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN   | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |                        | SEKTOR UTAMA   | SEKTOR PENDUKUNG  |
|-----|-----------|----------|---|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------------------------|--|---|
|     |           |          |   |          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |                        |  |   |
|     |           |          | c) Tingkat Kota   | Kegiatan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V                      | Dinas Lingkungan Hidup                                       | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dan pemprov |
|     |           |          | d) Tingkat Kecamatan  | Kota     | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V                      | Dinas Lingkungan Hidup                                       | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, pemprov.    |
|     |           |          | 3) Pembentukan bank sampah induk di Kota  | Kota     |       |      | V    |      |      |      |      |      |   | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Pemprov. |   |
|     |           |          | e. Pembentukan sistem informasi   |          |       |      |      |      |      |      |      |      |   | Dinas Lingkungan Hidup |  |   |
|     |           |          | Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan |          |       |      |      |      |      |      |      |      |   |                        |  |   |

| NO. | KEBLAKAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN   | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG   |
|-----|------------|----------|---|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|------------------------|--|
|     |            |          |   |          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |   |                        |  |
|     |            |          | dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: |          |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |                        |  |
|     |            |          | 1) Nasional   | Nasional | √     | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ | √ | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov. |
|     |            |          | 2) Provinsi   | Provinsi | √     | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ | √ | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov. |
|     |            |          | 3) Kota   | Kota     | √     | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ | √ | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan,  |

| NO. | KEBLAKAN | STRATEGI | PROGRAM      | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG  |
|-----|----------|----------|--------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|--------------|---|
|     |          |          |              |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |   |              |   |
|     |          |          |              |           |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |              | Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, Kecamatan, Kelurahan   |
|     |          |          | 4) Kecamatan | Kecamatan | √     | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ | √ | √            | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, Kecamatan, Kelurahan |
|     |          |          | 5) Kelurahan | Kota      | √     | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ | √ | √            | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, Kecamatan, Kelurahan |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI  | PROGRAM  | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |                        | SEKTOR UTAMA   | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|---|--|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------------------------|--|------------------|
|     |           |   |  |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |                        |  |                  |
|     |           | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, dan informasi, dan edukasi (KIE) | 1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal | Kegiatan          | √     | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov, Kecamatan, Kelurahan, Dharma Wanita, PKK, Perguruan Tinggi. |                  |
|     |           |   | 2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah               | Kegiatan / Lokasi | √     | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi  |                  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG   |
|-----|-----------|----------|--|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|------------------------|--|
|     |           |          |  |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |                        |  |
|     |           |          | Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat   |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |                        | dan<br>Informatika,<br>Dinas Sosial,<br>Pemberdayaa<br>n Perempuan<br>dan<br>Perlindungan<br>Anak,<br>pemprov,<br>Pemekot,<br>Kecamatan,<br>Kelurahan,<br>Dharma<br>Wanita, PKK,<br>Perguruan<br>Tinggi. |
|     |           |          | 3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan | Kegiatan / Lokasi | √     | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR,<br>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN     | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA   | SEKTOR PENDUKUNG   |
|-----|-----------|----------|--|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--|--|
|     |           |          |  |            | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |  |  |
|     |           |          |  |            | √     | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ | Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov, Kecamatan, Kelurahan, Perguruan Tinggi. | dan Perlindungan Anak, pemprov, Kecamatan, Kelurahan, Perguruan Tinggi.  |
|     |           |          | 4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi | Kegiatan   | √     | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   | Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov, Kecamatan, Kelurahan, Dharma Wanita, PKK, Perguruan Tinggi. |
|     |           |          | 1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan  | Unit/tahun |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas   | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,   |
|     |           |          | g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam  |            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |  |  |



| NO. | KEBLAKAKAN | STRATEGI  | PROGRAM                          | SATUAN         | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   |  | SEKTOR UTAMA         | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|------------|---|----------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--|----------------------|------------------|
|     |            |   |                                  |                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |  |                      |                  |
|     |            | pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  | KUR                              | Produsen/tahun |       | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √   | Koperasi dan UKM   | pemprov, dunia usaha |                  |
|     |            | 2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga          | Produsen/tahun                   |                |       | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov.                        |                      |                  |
|     |            | 3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Produsen/tahun                   |                |       | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov.                        |                      |                  |
|     |            | 4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis                                      | Kelompok orang/Bank sampah/tahun |                |       | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM                 | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan |                      |                  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN                                   | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   | SEKTOR UTAMA  | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|------------------|
|     |           |          |  |  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |   |   |                  |
|     |           |          | masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga   |  |       | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ |   | Daerah, pemprov.  |                  |
|     |           |          | 5) Penerapan sistem disinsentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Kelompok orang/<br>Bank sampah/<br>tahun |       | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov. |                  |
|     |           |          | 6) Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah   | Kawasan/<br>tahun                        |       | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √    | √ | √ | Dinas Lingkungan Hidup                            | Dinas Perindustria, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Badan                        |                  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI   | PROGRAM   | SATUAN             | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG   |
|-----|-----------|--|---|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|--|
|     |           |  |   |                    | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |              |  |
|     |           |  | Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggaz ( <i>beyond compliance</i> )   |                    |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              | Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov.  |
|     |           | h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:<br>1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur<br>2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen | Produsen/<br>tahun |       |      |      | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, pemprov, Bagian Hukum, Satpol PP, dan dunia usaha |
|     |           |  |   | Produsen/<br>tahun |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              | Dinas Lingkungan Hidup dan Perindustrian dan Dinas Perdagangan                               |
|     |           |  |   | Produsen/<br>tahun |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan,  |

| NO. | KEBIJAKAN                             | STRATEGI  | PROGRAM  | SATUAN             | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG   |   |
|-----|---------------------------------------|---|--|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--------------|--|---|
|     |                                       |   |  |                    | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |              |  |   |
|     |                                       |   | dalam pengurangan sampah pada sektor peritel   |                    |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Perindustrian dan Dinas Perdagangan                                  | pemprov, Bagian Hukum, Satpol PP, dan dunia usaha   |
|     |                                       |   | 3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman | Produsen/<br>tahun |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, pemprov, Bagian Hukum, Satpol PP, dan dunia usaha        |
|     |                                       |   | 4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah   | Produsen/<br>tahun |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan    | Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, pemprov, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman |
| 2.  | Peningkatan kinerja penanganan Sampah | a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) | 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan  | Dokumen            |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Dinas Lingkungan Hidup   | Bappeda, Bagian Hukum, dan Badan  |

| NO. | KEBIJAKAN                                    | STRATEGI  | PROGRAM   | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG  |  |
|-----|--|---|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|------------------------|---|--|
|     |  |   |   |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |                        |   |  |
|     | Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tipping fee</i> )  |         | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, Bagian Hukum, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, BPKAD, DPRD Kota dan Pemprov. | Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan BPKAD, dan Pemprov. |
|     |  |   | 2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, Bagian Hukum, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, BPKAD, DPRD Kota dan Pemprov. |  |
|     |  |   | 3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir      | Dokumen | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, Bagian Hukum, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, BPKAD, DPRD Kota dan Pemprov. |  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA                       | SEKTOR PENDUKUNG   |
|-----|-----------|----------|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------------------------------------|--|
|     |           |          |   |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |                                    |  |
|     |           |          | 4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemprov dan BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK                          |
|     |           |          | 5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum  | Dokumen |       |      |      |      |      | V    |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup             | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG                      |   |
|-----|-----------|----------|--|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|--------------|---------------------------------------|---|
|     |           |          |  |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |   |              |                                       |   |
|     |           |          | 6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: |         |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |              |                                       | (Kejaksaan),<br>Kementerian<br>Kesehatan                    |
|     |           |          | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  | Dokumen | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN,<br>Kemen PUPR,<br>KLHK,<br>Bappeda dan<br>BPKAD. |
|     |           |          | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  | Dokumen | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN,<br>Kemen PUPR,<br>KLHK,<br>Bappeda dan<br>BPKAD. |
|     |           |          | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga   | Dokumen | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN,<br>Kemen PUPR,<br>KLHK,<br>Bappeda dan<br>BPKAD. |
|     |           |          | d) Pengolahan  | Dokumen | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V | V            | Dinas                                 | BPPT, BSN,<br>Kemen PUPR,<br>KLHK,<br>Bappeda dan<br>BPKAD. |

| NO. | KEBLAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG                      |   |
|-----|----------|----------|--|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|---------------------------------------|---|
|     |          |          |  |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |              |                                       |   |
|     |          |          | Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga   |         |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              | Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR       | Kemen PUPR, KLHK, Bappeda dan BPKAD.            |
|     |          |          | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga   | Dokumen | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, Kemen PUPR, KLHK, Bappeda dan BPKAD. |
|     |          |          | 7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: | Dokumen | V     |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              |                                       | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK                  |
|     |          |          | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  | Dokumen | V     |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK                  |
|     |          |          | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  | Dokumen | V     |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK                  |



| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |  | SEKTOR UTAMA                          | SEKTOR PENDUKUNG               |
|-----|-----------|----------|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
|     |           |          |   |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |  |                                       |                                |
|     |           |          | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  | Dokumen | V     |      | V    |      | V    |      | V    |      | V |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK |
|     |           |          | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  | Dokumen | V     |      | V    |      | V    |      | V    |      | V |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK |
|     |           |          | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  | Dokumen | V     |      | V    |      | V    |      | V    |      | V |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK |
|     |           |          | 8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: |         |       |      |      |      |      | V    |      |      |   |  |                                       |                                |
|     |           |          | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  | Dokumen |       |      |      |      |      | V    |      |      |   |  | Dinas Lingkungan Hidup                | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                       | SEKTOR UTAMA                   | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|     |           |          |   |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |                                       |                                |                  |
|     |           |          | Tangga  | Dokumen |       | V    |      |      |      |      |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup                | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK |                  |
|     |           |          | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                               | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup                | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK |                  |
|     |           |          | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                              | Dokumen | V     |      |      |      |      |      |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup                | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK |                  |
|     |           |          | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                | Dokumen |       | V    |      |      |      |      |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup                | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK |                  |
|     |           |          | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                          | Dokumen |       | V    |      |      |      |      |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | BPPT, BSN, Kemen PUPR dan KLHK |                  |
|     |           |          | 9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis |         | V     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |                                       |                                |                  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG       |   |
|-----|-----------|----------|--|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--------------|------------------------|---|
|     |           |          |  |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |              |                        |   |
|     |           |          | Sampah Rumah Tangga, meliputi:   |         |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                        |   |
|     |           |          | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga        | Dokumen | V     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov                      |
|     |           |          | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga      | Dokumen | V     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov.                     |
|     |           |          | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga     | Dokumen | V     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, pemprov   |
|     |           |          | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga       | Dokumen | V     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Dinas Lingkungan Hidup | BPPT, BSN, pemprov dan pemkot                       |
|     |           |          | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | V     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              | Dinas Lingkungan Hidup | Kemen PUPR, KLHK, Dinas PUPR, , BPPT, BSN, pemprov. |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI  | PROGRAM  | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA   | SEKTOR PENDUKUNG  |
|-----|-----------|---|--|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|---|
|     |           |   |  |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |   |
|     |           |   | 10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)  | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup   | Dinas ES/DM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan   |
|     |           | b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | 1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: |         |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |   |
|     |           |   | a) Penyediaan lahan  | Dokumen |       |      |      |      | V    |      |      |      |  |  | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bappeda, BPN, BPKAD, Bawas, Bagian Hukum, Kejaksaan Tinggi, Kecamatan, Kelurahan |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG                            |  |
|-----|-----------|----------|--|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|---|--|
|     |           |          |  |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |              |   |  |
|     |           |          | b) Pembinaan Pegepul   | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              | Dinas Lingkungan Hidup                      | Bagian Hukum   |
|     |           |          | c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Pemprov dan Pemkot                          | Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, DPRD Kota, PDAM. |
|     |           |          | d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,                                 | Dokumen | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT | KemenPUPR, KLHK, Pemprov   |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |                                    |   |
|-----|-----------|----------|---|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--------------|------------------|------------------------------------|---|
|     |           |          |   |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |              |                  |                                    |   |
|     |           |          | pengolahan, dan pemrosesan akhir  |        |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  |                                    |   |
|     |           |          | 2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kota                                      | Unit   |       |      |      |      | V    |      |      |      |  |  |              |                  | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | KemenPUPR, Bappeda, DPRD Kota, BPKAD, dan Pemprov.  |
|     |           |          | 3) Pembangunan TPA regional antar Pemda                                       | Unit   |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  | Pemprov dan Pemkot                 | DPRD provinsi, DPRD Kota, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Pemkot |
|     |           |          | 4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional | Unit   |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  | Dinas PUPR                         | DPR, DPRD provinsi, DPRD Kota, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan               |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI  | PROGRAM   | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |                 |                                       |  | DASAR, dan<br>Pemkot |
|-----|-----------|---|---|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|---------------------------------------|--|----------------------|
|     |           |   |   |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SEKTOR<br>UTAMA | SEKTOR<br>PENDUKUNG                   |  |                      |
|     |           | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah | Pertemuan / tahun | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V               | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | DPR, DPRD provinsi dan Kota, pemprov, Bappeda, BPKAD |                      |
|     |           | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penangan  | 1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pemilahan,   | Daerah            | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V               | Dinas Lingkungan Hidup                | Dinas PUPR, KemenPUPR, KLHK                          |                      |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI   | PROGRAM  | SATUAN   | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA                          | SEKTOR PENDUKUNG  |
|-----|-----------|--|--|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---------------------------------------|---|
|     |           |  |  |          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |                                       |   |
|     |           | Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:<br>b) pemprov dan Pemkot   | Daerah   | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemprov, dan Pemkot |
|     |           |  | c) DPRD Kota   | Daerah   |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemprov, dan Pemkot |
|     |           |  | 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Kegiatan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR    | KemenPUPR, KLHK   |



| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM                         | SATUAN   | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   | SEKTOR UTAMA                          | SEKTOR PENDUKUNG  |   |
|---------------|----------|---------------------------------|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
|               |          |                                 |  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |   |                                       |   |   |
|               |          | di:                             |  |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |                                       |   |   |
|               |          | a) Kota                         | Kegiatan   | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V | V                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR                       | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemprov |
|               |          | b) tingkat kecamatan            | Kegiatan   | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemprov, dan Pemkot |   |
|               |          | c) tingkat kelurahan            | Kegiatan   | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemprov.            |   |
|               |          | e. Pembentukan sistem informasi | Pengembangan jejaring daerah data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemprov.            |   |

| NO. | KEBIJAKAN | • STRATEGI                                       | PROGRAM  | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG                      |   |
|-----|-----------|--|--|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|---------------------------------------|---|
|     |           |  |  |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |              |                                       |   |
|     |           |  | Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di: |           |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              |                                       |   |
|     |           |  | 1) kota  | Kota      | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemprov.    |
|     |           |  | 2) kecamatan   | Kecamatan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemprov.    |
|     |           |  | 3) Kelurahan   | Kelurahan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemprov.    |
|     |           | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE | 1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah                    | Kegiatan  | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup                | Dinas PUPR, Kelurahan, Kecamatan, Darma Wanita, PKK |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN             | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA   | SEKTOR PENDUKUNG     |
|-----|-----------|----------|---|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--|----------------------|
|     |           |          |   |                    | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |  |                      |
|     |           |          | Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir                     |                    | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas PUPR, Kelurahan, Kecamatan, Darma Wanita, PKK dan Perguruan Tinggi                                     | dan Perguruan Tinggi |
|     |           |          | 2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat | Kelompok           | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas Lingkungan Hidup   |                      |
|     |           |          | 3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan    | Kelompok / Kawasan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Kelurahan, Kecamatan, Perguruan Tinggi |                      |
|     |           |          | 4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah                                    |                    |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |  |                      |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM                                       | SATUAN         | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG                  |   |
|-----|-----------|----------|---|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|-----------------------------------|---|
|     |           |          |   |                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |              |                                   |   |
|     |           |          | Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:          |                |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              |                                   |   |
|     |           |          | a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat | Unit/<br>tahun | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot | Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan PPK dan Perguruan Tinggi |
|     |           |          | b) Kawasan (TPS3R)                            | Lokasi         | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot | Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan PPK,                     |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI   | PROGRAM   | SATUAN     | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG                          |  |
|-----|-----------|--|---|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|--------------|---|--|
|     |           |  |   |            | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |   |              |   |  |
|     |           |  |   |            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |              | Kecamatan, Kelurahan dan Perguruan Tinggi |  |
|     |           |  |   | Lokasi     | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V | V            | Dinas Kelangkaan Hidup                    | Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, pemprov, Darma Wanita, PKK, Kecamatan, Kelurahan dan Perguruan Tinggi |
|     |           |  | 5) Peningkatan kemampuan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga |            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |              |   |  |
|     |           |  | 1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:<br>a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam   | Perusahaan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V | V            |   | Dinas PUPR, BPKAD, Bagian  |
|     |           | g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan |   |            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |              |   |  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN       | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG              |  |
|-----|-----------|----------|---|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|-------------------------------|--|
|     |           |          |   |              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |              |                               |  |
|     |           |          | penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir            |              |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              | Usaha, Dinas Lingkungan Hidup | Hukum  |
|     |           |          | b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)    | Perusahaan   |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              |                               |  |
|     |           |          | 2) Peringkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Pelaku Usaha | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup        | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI  | PROGRAM  | SATUAN | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |                        | SEKTOR UTAMA                         | SEKTOR PENDUKUNG                                    |              |
|-----|-----------|---|--|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------------------------|--------------------------------------|---|--------------|
|     |           |   |  |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |                        |                                      |   |              |
|     |           |   |  |        |       |      |      |      |      |      |      |      |   |                        |                                      |   | pelaku usaha |
|     |           | h. Penguatan penegakan hukum                                  | 1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan Pemda, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | orang  | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V                      | Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot    | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan |              |
|     |           | 2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional | Kegiatan / tahun   | V      | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | Dinas Lingkungan Hidup | Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan |   |              |

| No. | KEBIJAKAN | STRATEGI   | PROGRAM   | SATUAN      | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG       |      |   |  |
|-----|-----------|--|---|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------|------|---|--|
|     |           |  |   |             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |                        | 2025 |   |  |
|     |           |  | penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir   |             | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V            |                        |      | Kejaksanaan   |  |
|     |           | i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah | Pengintegrasian pengaturan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kota | Ijin/ tahun | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V            | Dinas Lingkungan Hidup |      | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Polri, Kejaksanaan, BKPM, Pemprov, Kelurahan, Kecamatan. |  |
|     |           | j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah  | 1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah  |             |       |      |      |      |      |      |      |              |                        |      |   |  |



| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI  | PROGRAM   | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |  |
|-----|-----------|---|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--------------|------------------|--|
|     |           |   |   |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |              |                  |  |
|     |           | Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna | Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir   |         |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  |  |
|     |           |   | 2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  |  |
|     |           |   | a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal  |         |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  |  |
|     |           |   | b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di  |         |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  |  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG                                   |  |
|-----|-----------|----------|--|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|--|--|
|     |           |          |  |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |              |  |  |
|     |           |          | TPA  | Kota    |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              |  |  |
|     |           |          | c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF   |         |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              |  |  |
|     |           |          | 4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan  | TPA     | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, pemprov. |
|     |           |          | k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              |  | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, pemprov, dan Pemkot                          |
|     |           |          | 1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan |         |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              |  |  |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |   | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG                               |   |
|-----|-----------|----------|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--------------|--|---|
|     |           |          |   |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |   |              |  |   |
|     |           |          | pemrosesan akhir  |         |       |      |      |      |      |      |      |      |   |   |              |  |   |
|     |           |          | 2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis masyarakat.                        | Lokasi  | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemrov | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, dan Pemkot |
|     |           |          | 3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis masyarakat. | Lokasi  | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup, dan pemprov            | Pemkot  |
|     |           |          | 4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis   | Kawasan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V | V | V            | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemrov | Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan   |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |     |   | SEKTOR UTAMA                                | SEKTOR PENDUKUNG  |
|-----|-----------|----------|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|---|---|
|     |           |          |   |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | UKM |   |   |   |
|     |           |          | Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.                                 |         |       |      |      |      |      |      |      |      |     |   | Pemkot                                      | UKM   |
|     |           |          | 5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan | Kawasan | V     | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V    | V   | V | Dinas Lingkungan Hidup, pemprov, dan Pemkot | Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasannya khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial |

| No. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |  |  | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|----------|---|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--------------|------------------|
|     |           |          |   |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |              |                  |
|     |           |          | Sampah Sejenis<br>Sampah Rumah<br>Tangga berbasis<br>kawasan melalui<br>kegiatan pemilahan,<br>pengumpulan, dan<br>pengangkutan |        |       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |              |                  |

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2018  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



SHOENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 35.